

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang serta kewajiban otonomi yang guna untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang diatur dalam peraturan Undang-undang No.32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan ataupun penerapan otonomi daerah di Negara Indonesia menjadi titik fokus yang penting untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai strata pemerintahan paling bawah.

Berkaitan dengan peran tersebut, yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Desa juga bisa disebut dengan nama lain desa adat. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan yang terjadi di pemerintahan, suatu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dalam masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa sebagai tatanan pemerintahan terkecil bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut peraturan menteri dalam negeri (permendagri) No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam proses pengelolaan desa yang dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses yang terdapat dalam pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan

tertib dan disiplin anggaran. Laporan keuangan desa sangat mudah dipahami untuk dikaji dan banyaknya tuntutan dari akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Tuntutan yang semakin besar oleh akuntabilitas yang menimbulkan implikasi kepada pemerintah desa untuk memberikan informasi yang lebih baik.

Faktor penting dalam pembangunan suatu wilayah yang diukur dari segi infrastruktur maupun dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kriteria dan unsur-unsur pembentukan kualitas informasi dan laporan keuangan pemerintah yang mempunyai nilai dan manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah (PP No.71 Tahun 2010). Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Tingkat kualitas laporan keuangan desa dapat diketahui dari fungsi pengawasan salah satunya tentang laporan keuangan yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukti yang memadai, kualitas sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan yang sesuai harus menggunakan standar operasional serta penyajian laporan keuangan dilihat dari secara keseluruhan akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa.

Laporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus sangat menarik untuk dikaji, dilihat dari banyaknya tuntutan dari akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Tuntutan yang semakin besar oleh akuntabilitas publik yang menimbulkan implikasi kepada pemerintah desa untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi publik, salah satu laporan tersebut yaitu laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah pemerintahan yang telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintahan diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan yang terdiri dari relevan, reabilitas atau andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Herawati, 2014).

Namun ada fenomena kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dana desa, oleh Kepala Desa tahun 2021. Warga Desa Lau, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus melaporkan kejadian korupsi yang melibatkan “HS” (Kepala Desa) ke kantor Mapolres Kudus. Diduga melakukan pemalsuan proyek fiktif berjumlah 14 proyek, dengan nominal kerugian Negara diperkirakan mencapai 1 Miliar lebih (<https://jateng.tribunnews.com>).

Berdasarkan dari fenomena tersebut yang terjadi di Desa-desa Kabupaten Kudus menunjukan bahwa tingginya tuntutan masyarakat akan pentingnya pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan Laporan keuangan, dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika tidak ada permasalahan seperti fenomena tersebut.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan dari berbagai pihak khususnya bagi pengguna informasi laporan keuangan. Hal itu tidak terlepas dari kualitas dengan proses pelaporan, pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta dibutuhkan pula sumber

daya manusia yang berkualitas yang mampu memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintah desa. Tidak terlepas yang berlandaskan dari latar belakang pendidikan yang sesuai, maka kebutuhan dalam hal ini tentunya pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mempunyai pengalaman di bidang keuangan.

Dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses faktor terpenting dalam melihat bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu harus melakukan dukungan dari pihak pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia yang berlatar belakang dari pendidikan di bidang akuntansi serta bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dibutuhkan dan dipakai bagi para pihak yang membutuhkan khususnya para pengguna informasi keuangan.

Faktor pertama yang menjadi dasar penting untuk mendukung adanya kualitas laporan keuangan desa adalah *internal control*. Tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai guna untuk mengetahui kegiatan secara efektif dan efisien yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menyediakan informasi keuangan secara jelas serta mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Peraturan pemerintah (Pmendagri) Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono Umar dkk (2018) dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa *internal control* berpengaruh

positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Elmira Febri Darmayanti (2018) yang menyatakan bahwa *internal control* berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah kompetensi sumber daya manusia. Kemampuan dan karakteristik seorang pegawai yang memiliki pengetahuan, sikap perilaku, dan ketrampilan mempengaruhi secara langsung dalam melaksanakan tugas jabatan, sehingga pegawai bisa melakukan tugas secara professional, efektif dan efisien. Kompetensi juga mempunyai faktor penentu bagi seseorang untuk memperlihatkan kinerja terbaiknya serta menentukan faktor organisasi dalam menghadapi terjadinya perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dkk (2018) dan (Kiranayanti dan Erawati, 2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Animah dkk (2020) yang menyatakan bukti empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Semua komponen yang saling berkaitan serta memiliki fungsi seperti mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung dalam pembuatan keputusan dan pengawasan suatu organisasi (Laudon & Laudon 2000). Adanya sistem informasi akuntansi maka perusahaan juga bisa melakukan proses informasi yang bisa

memudahkan proses-proses sehingga dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan Tiya Lestari Dan Trisna Dewi (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yanti (2020) yang membuktikan bukti empiris bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintah juga memiliki bidang ilmu akuntansi yang sedang berkembang dengan pesat. SAP yaitu satu-satunya dari standar dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah, yang memiliki upaya dalam pengharmonisan dari berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik dari dana desa masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dapat memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sudirianti dkk (2020) dan M. Khoirul Abidin, dkk (2018) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian dari Mildamayanti dkk (2018) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Berdasarkan faktor-faktor mengenai kualitas laporan keuangan desa adalah bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam satu

periode. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan desa memudahkan bagi para pemakai yang memahami informasi dari laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan desa. Perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu pertama penelitian dilakukan hanya satu desa, sedangkan penelitian ini lebih dari satu desa. Perbedaan yang kedua yaitu pengaruh *internal control*, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan variabel lainnya untuk memperjelas kualitas laporan keuangan desa, terkait dengan laporan keuangan dibuat untuk mengambil keputusan, alat akuntabilitas publik dapat memberikan informasi yang telah diterapkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya terkait dengan penambahan variabel yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi karena adanya sistem informasi akuntansi yang baik maka pemerintah desa dapat melakukan informasi maupun operasi yang lebih efektif dan efisien karena adanya pengendalian yang mampu mengendalikan proses-proses tersebut sehingga menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang diinginkan. Penambahan lainnya juga terkait variabel tentang pemahaman standar akuntansi pemerintahan karena adanya pengharmonisan berbagai peraturan baik dipemerintah pusat maupun pemerintah desa. Standar akuntansi pemerintah juga mempunyai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Sesuai dengan yang dimuat dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Internal Control, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus)”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah beberapa desa di Kabupaten Kudus.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Variabel dependen: kualitas laporan keuangan desa.
 - b. Variabel independen: *internal control*, kompetensi sumber daya manusia pada pengelolaan dana desa, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas. Maka, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *internal control* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia pada pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?
3. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?

4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *internal control* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil proses penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta dapat membantu bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kudus agar menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang baik mengenai kualitas laporan keuangan desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dengan referensi untuk melakukan peneliti selanjutnya yaitu terkait pengaruh *internal control*, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi,

pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan desa dengan objek penelitian yang berbeda.

